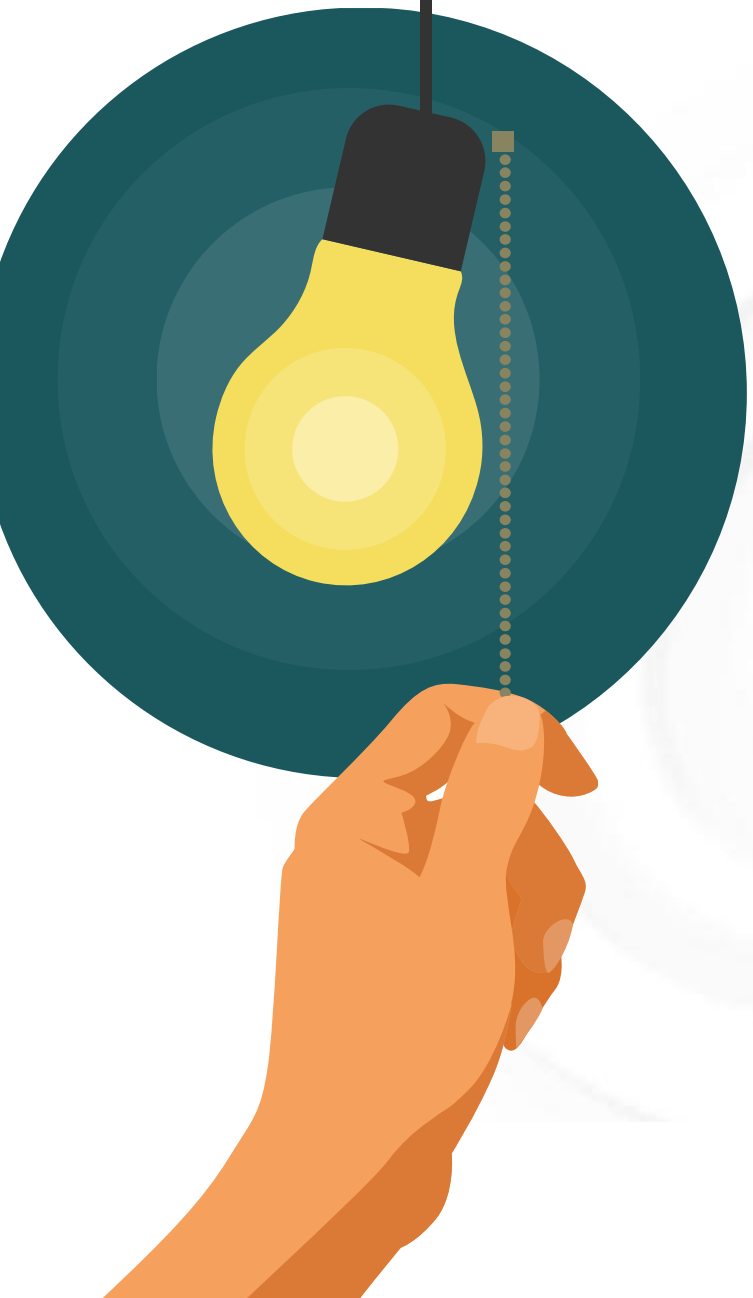
Daya Saing Daerah Berkelanjutan

Robert Na Endi Jaweng
Direktur Eksekutif KPPOD



Daya saing Indonesia masih rendah, baik level nasional maupun daerah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya peringkat Indonesia dalam beberapa indeks internasional yaitu GCI (2019), EoDB (2020). Selain itu, indeks ACI (2017) juga menunjukkan masih terdapat disparitas kemampuan bersaing yang besar antardaerah di Indonesia.

Daya saing juga belum dibangun di atas pilar pembangunan berkelanjutan. IIndeks EPI (2018) menyebutkan rendahnya peringkat Indonesia (peringkat ke-133 dari 180 negara) disebabkan oleh penurunan beberapa kategori lingkungan seperti sumber daya air dan kawasan hutan.



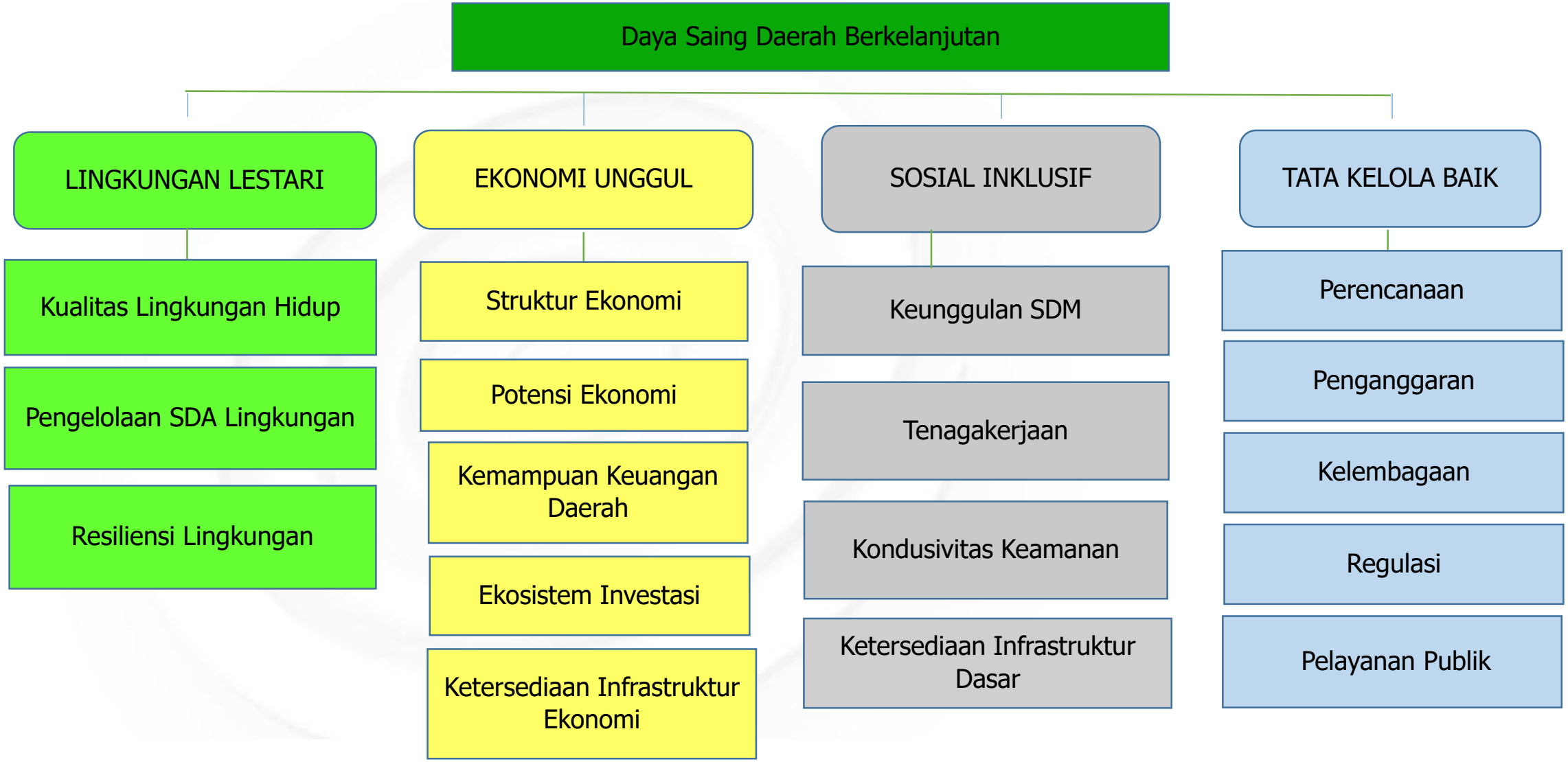
RUU Daya Saing Daerah

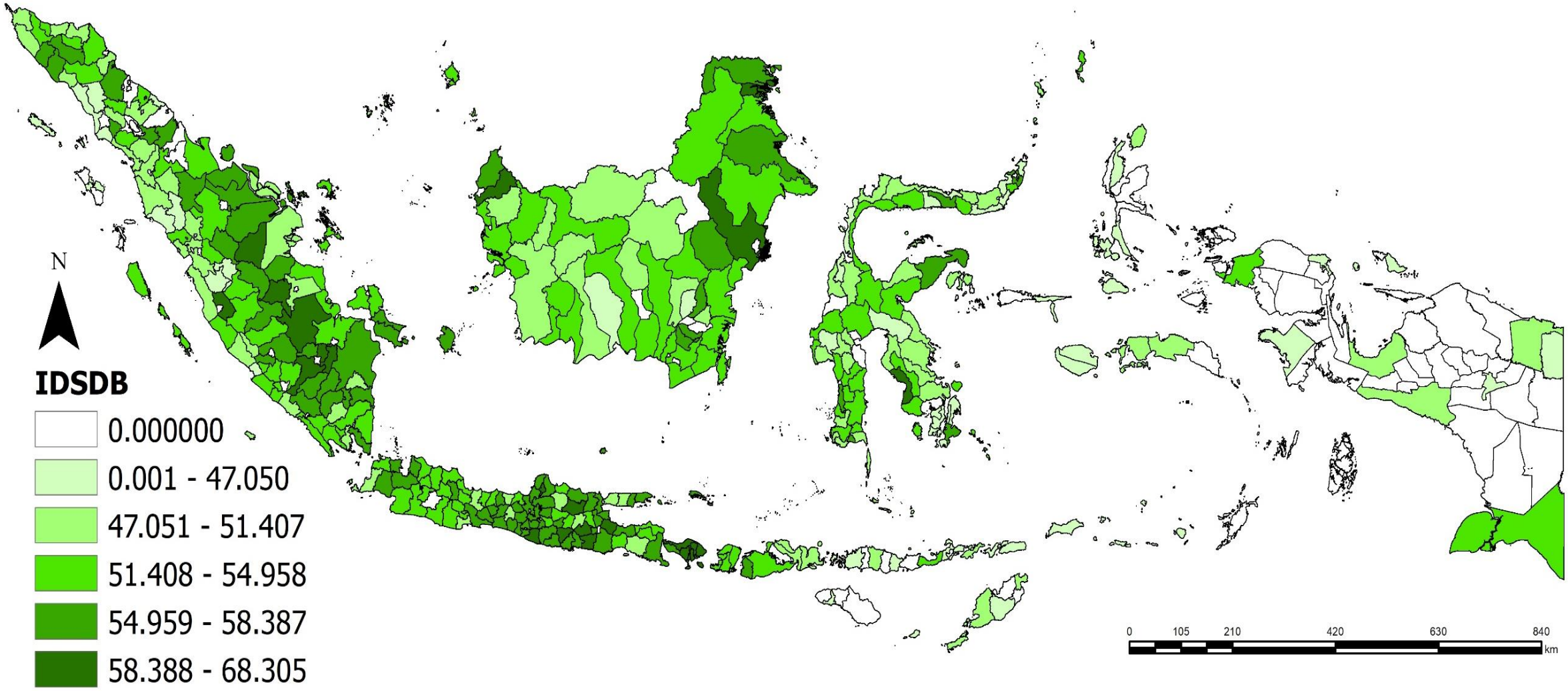
bertujuan untuk mendorong afirmasi daya saing daerah dan meningkatkan inovasi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diperlukan perumusan dan pengembangan sebuah kerangka penilaian *(measurement)* berkala

Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan

bertujuan untuk membangkitkan semangat daerah dalam meningkatkan daya saing yang berkelanjutan melalui beberapa komponen utama yang telah diusung dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals [SDGs], Draft RUU Daya Saing Daerah dan beberapa inisiatif seperti Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD), Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED), dsb.


Daya Saing Daerah Berkelanjutan
LINGKUNGAN LESTARI
Kualitas Lingkungan Hidup
Pengelolaan SDA Lingkungan
Resiliensi Lingkungan
EKONOMI UNGGUL
Struktur Ekonomi
Potensi Ekonomi
Kemampuan Keuangan Daerah
Ekosistem Investasi
Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi
SOSIAL INKLUSIF
Keunggulan SDM
Tenagakerjaan
Kondusivitas Keamanan
Ketersediaan Infrastruktur Dasar
TATA KELOLA BAIK
Perencanaan
Penganggaran
Kelembagaan
Regulasi
Pelayanan Publik



Semakin pekat warna hijau menandakan semakin tinggi nilai Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan.

Hasil penyusunan indeks menunjukkan daya saing daerah berkelanjutan (DSDB) pada umumnya berada pada level sedang. Kenyataan ini tampak dalam score yang berkisar 40.59 sampai 68.30 dengan rata-rata 52.57. Artinya, DSDB di indonesia sudah memasuki level sedang, tapi belum mencapai level sangat tinggi. Daerah yang memiliki DSDB sedang sebesar 96.91% dan yang menempati level tinggi hanya 3.09%. Realitas ini menunjukkan masih dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kapasitas daerah, terutama dalam mencapai daya saing daerah berkelanjutan.



Kabupaten berdaya saing berkelanjutan di atas rata-rata nasional sebagian besar berada di kawasan barat Indonesia (71.94 persen). Skor ini menunjukkan bahwa disparitas daya saing antarwilayah masih menjadi persoalan yang dihadapi Indonesia. Gap itu terutama tampak pada pilar ekonomi (infrastruktur ekonomi dan ekosistem investasi) dan pilar sosial inklusif (kualitas SDM).



Daerah dengan ekonomi unggul, menghadapi tantangan daya dukung dan tampung lingkungan.



Aspek keamanan dan kualitas SDM dalam pilar sosial, belum menjadi faktor yang dominan bagi daerah



Daerah dengan ekonomi dan sosial inklusif yang rendah, memiliki daya dukung dan tampung lingkungan lebih baik



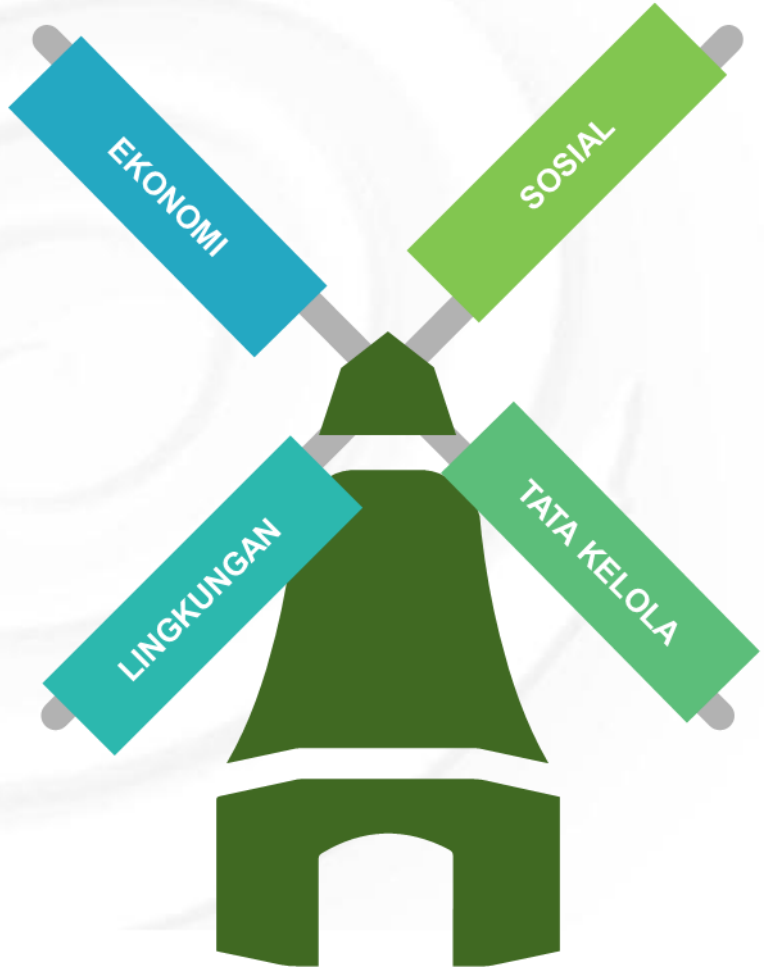
Daerah yang memiliki skor tata kelola di atas rata-rata memiliki peringkat daya saing berkelanjutan yang tinggi.



Keseimbangan antara Lingkungan Lestari, Ekonomi Unggul, Sosial Inklusif, dan Tata Kelola yang Baik mempengaruhi Daya Saing Daerah Berkelanjutan.

Pendukung

- Lingkungan Lestari: SDA yang melimpah (endowment); komitmen pemda
- Ekonomi Unggul: infrastruktur ekononmi yang mumpuni, produk unggulan daerah, Bumdes.
- Sosial Inklusif: jumlah penduduk, prioritas pemerintah (SDM dan tenaga kerja); ketersediaan infrastruktur sosial.
- Tata Kelola: Kepemimpinan Lokal, internet (platform online).



Penghambat

- Lingkungan Lestari: Konsesi lahan (kewenangan pusat).
- Ekonomi Unggul: keterbatasan infrastruktur ekonomi, minimnya inovasi pengembangan potensi ekonomi.
- Sosial Inklusif: kualitas SDM rendah.
- Tata Kelola: keterbatasan anggaran, perencanaan kurang fokus, dan kewenangan daerah.

Inovasi berbasis prinsip keberlanjutan harus menjadi prioritas daerah, terutama bagi daerah yang mengandalkan SDA sebagai fondasi perekonomian daerah saat ini dan di masa depan. Untuk daerah yang kondisi lingkungannya baik dan aspek sosial mendukung, diperlukan insentif tambahan agar mereka bisa mengembangkan pilar ekonomi dan tata Kelola melalui inovasi berkelanjutan

Keseimbangan antarpilar menjadi kunci peningkatan daya saing daerah berkelanjutan. Pentingya keberimbangan ini mengingat sejumlah daerah mengalami turbulensi pada sebagai dampak wabah Covid-19..

Perbaikan tata kelola melalui pelayanan publik, optimalisasi peran kelembagaan dan kebijakan yang tepat agar tercipta pelayanan yang prima, mudah, murah dan cepat perlu direfleksikan di daerah.



Penguatan otonomi daerah melalui perbaikan kebijakan kelembagaan yang memberi ruang yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan eksternalitas.

.

Perbaikan kualitas SDM, infrastruktur ekonomi dan sosial daerah menjadi faktor penting dan mutlak diperlukan, mengingat hal ini mampu mendorong tumbuhnya aktivitas usaha baru dan mendatangkan *multiplier effect* yang besar bagi daya saing berkelanjutan

.

Kapasitas dan integritas kepemimpinan daerah yang kuat menentukan terwujudnya tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penguataan tata kelola mesti didukung penataan sistem yang melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas.








Permata Kuningan, 10th floor
Jl. Kuningan Mulia 9C Setiabudi
Jakarta 12980

Phone : 62-21-8378 0642/53
Fax : 62-21-8378 0643
Home Page : Http://www.kppod.org
E-mail : kppod@kppod.org